



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 - 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

2009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2005 – 2025

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Gresik untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Kabupaten Gresik dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat di tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.

Dengan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Daerah hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2006-2010, RPJM Daerah II Tahun 2011-2015, RPJM Daerah III Tahun 2016-2020, dan RPJM Daerah IV Tahun 2021-2025.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah dan lintas satuan kerja perangkat daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro daerah yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal daerah dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Daerah sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal daerah, serta program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro daerah yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal daerah dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2011, 2016, 2021, dan 2026. Namun demikian, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2011, 2016, 2021, dan 2026, melalui mekanisme perubahan APBD (PAPBD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2005-2025.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menyusun RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Kabupaten Gresik serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kabupaten Gresik.

Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan daerah dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Gresik.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah.

Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan RPJM Daerah. Peraturan Daerah ini memberikan batasan waktu bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menyesuaikan RPJM Daerah dengan RPJP Daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005–2025 terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Daerah dengan RPJP 2005 – 2025 serta Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2005–2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2011, 2016, 2021, dan 2026.

Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD (PAPBD).

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Untuk mengakomodasi RPJM Daerah yang telah ada agar sesuai dengan RPJP Daerah yang telah disesuaikan dengan RPJP Nasional, maka RPJM Daerah substansinya perlu disesuaikan dengan RPJP Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam 20 tahun mendatang, Gresik akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Daerah, perlu diteruskan hasil – hasil pembangunan yang sudah dicapai, permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangannya ke depan ke dalam suatu konsep pembangunan jangka panjang, yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan bermasyarakat dan berpemerintah daerah, yang akan menuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat dan taraf pembangunan yang hendak dicapai.

Sesuai dengan pasal 5 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik meliputi pengantar, kondisi umum, potensi pembangunan dan faktor strategis, visi dan misi pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 dan arah pembangunan jangka panjang. Secara keseluruhan diharapkan nantinya bisa menggambarkan perjalanan Kabupaten Gresik dalam 20 tahun mendatang.

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Sedangkan tujuannya adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kurun waktu lima tahunan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

1.4. LANDASAN HUKUM

Landasan RPJP Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan yang memuat latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penyusunan. |
| Bab II | Kondisi Umum yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting, kondisi dan tantangan, termasuk isu-isu strategis serta modal dasar Kabupaten Gresik dalam menyusun RPJP Daerah. |
| Bab III | Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005–2025 yang memuat visi Kabupaten Gresik dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. |
| Bab IV | Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang memuat Arah Pembangunan, Periodisasi Pendatahapan Pembangunan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Gresik Tahun 2005–2025. |

Bab V Penutup yang memuat kaidah pelaksanaan.

BAB 2

KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gresik ini disusun dengan maksud mencari pemecahan solustif antisipatif terhadap kebutuhan daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Pada berikut ini dipaparkan kondisi-kondisi yang diproyeksikan muncul menjadi isu penting dan signifikan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Gresik pada periode yang akan datang tersebut baik pada level global Internasional, nasional, regional maupun lokal Gresik sendiri.

2.1. KONDISI DAN TANTANGAN GLOBAL

Kondisi dan tantangan global internasional yang diperkirakan secara signifikan mempengaruhi aksi pembangunan daerah kabupaten Gresik dalam 20 tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

1. Di masa mendatang secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional maupun daerah. Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah-daerah di Indonesia. Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Derasnya arus globalisasi membawa efek positif sekaligus negatif. Dalam kaitan itu, tantangan bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Gresik adalah menyiapkan diri menghadapi globalisasi perekonomian tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Tak pelak globalisasi ini akan berimplikasi pada hampir seluruh performa aspek dan sektor pembangunan di Kabupaten Gresik, misalnya: eksistensi produk lokal perlu proteksi HAKI, membanjirnya barang dan jasa import, dan keterkejutan dan konflik budaya (*cultural shock*). Oleh karena itu di masa depan semakin diperlukan arahan kebijakan yang didasarkan pada identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, serta peluang sektoral dan aspek, berdasarkan potensi diri Kabupaten Gresik agar tetap *survive* eksis mensejahterakan masyarakatnya.

2. Globalisasi membawa perubahan paradigma yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan baik Nasional maupun Daerah. Dalam kaitan dengan globalisasi tersebut telah dan akan terus terjadi revolusi teknologi dan informasi (TI) yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan karya masyarakat dan pemerintahan. Konsekuensinya, masyarakat akan semakin menuntut pelayanan yang cepat, praktis namun murah. Di masa depan pengaruh TI ini harus berdampak positif pada perubahan kinerja dalam bidang aparatur negara. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* harus didukung juga oleh *e-goverment* yang memadai dalam bentuk pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.
3. Kendati dalam era globalisasi informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing, namun diperlukan suatu kemampuan khusus untuk mengakses informasi. Beberapa masalah yang dihadapi dalam optimalisasi pemanfaatan informasi tersebut, antara lain : terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk akses informasi tersebut yang sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia umumnya (termasuk Kabupaten Gresik) untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan digital dan kesenjangan budaya (*cultural lag*) dengan masyarakat global. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan bersaing, pesimisme bahkan keputusasaan lokal menghadapi serbuan barang dan jasa asing. Dalam kaitan itu, perlu segera disusun suatu arahan

kebijakan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan masyarakat dan aparat dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat tersebut.

4. Awal dekade ini telah terjadi perubahan geopolitik internasional, ditandai dengan memudarnya prinsip multilateralisme seiring dengan sangat dominannya kekuatan negara adikuasa Amerika di dalam tata politik internasional. Menguatnya pendekatan unitelarisme tersebut berdampak pada berkembangnya doktrin pertahanan "*per-emptive strike*" akan merubah tatanan politik internasional yang berlaku saat ini. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kondisi nasional dan daerah yang masih mengharapkan datangnya investasi modal asing, Lebih jauh paradigma geopolitik internasional ini justru akan memunculkan sentimen lokal untuk anti asing (Amerika dan sekutu) dan bahkan bibit terorisme sehingga pada akhirnya merugikan kestabilan lingkungan investasi di daerah.

2.2. KONDISI DAN TANTANGAN NASIONAL

Adapun kondisi dan tantangan penting nasional yang dipekirakan mempengaruhi aksi pembangunan daerah kabupaten Gresik saat ini dan mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat perubahan-perubahan politik yang cukup mendasar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Perubahan-perubahan politik ini jelas akan mempengaruhi lingkungan pembangunan baik secara nasional itu sendiri maupun daerah pada masa 20 tahun. Pertama, proses amandemen (I, II, III, dan IV) UUD 1945 yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru di bidang politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR dan DPR yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketiga, terciptanya format hubungan pusat-daerah yang baru berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keempat, disepakatinya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di dalam konstitusi dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan yang menjadi dasar pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kelima, kesepakatan mengenai diakhirinya pengangkatan TNI/Polri dan Utusan Golongan di dalam komposisi parlemen hasil pemilu 2004. Keenam, kesepakatan nasional mengenai netralitas PNS, TNI dan Polri terhadap politik. Netralitas PNS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Ketujuh, konsensus perlunya payung kelembagaan yang independen khusus dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/KPK. Kedelapan, terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang memiliki wewenang menguji keabsahan peraturan perundangan terhadap konstitusi sesuai UUD 1945, Pasal 24C, Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Semua perubahan dalam sistem perundang-undangan ini jelas berpengaruh pada konstelasi sistem dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Gresik, oleh karena itu sangatlah *urgent* disusun suatu pedoman yang akan secara sistematis dan legal mengarahkan perilaku pembangunan daerah di masa depan.

2. Proses demokratisasi secara nasional sebagai akibat dari pelaksanaan reformasi dan desentralisasi juga mengalami perubahan yang signifikan. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat di seluruh Indonesia semakin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Namun demikian, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya hak

dan tanggungjawabnya. Namun demikian, sebagai akibat dari tidak dipenuhinya hak dan tanggung-jawab masyarakat pada masa lampau, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan proses demokratisasi, menimbulkan ledakan tuntutan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi peluang, tantangan sekaligus menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini. Tiadanya partisipasi masyarakat akan membuat aparatur negara tidak mampu menghasilkan kebijakan yang tepat dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi dan tuntutan masyarakat di masa depan perlu dikodifikasikan dalam bentuk agenda masa depan, agar mampu menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang dapat memenuhi aspek-aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik.

3. Secara nasional, birokrasi juga belum banyak mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan internal birokrasi yang kini tengah dihadapi dalam kurun 20 tahun mendatang masih akan sulit terselesaikan. Pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan negara yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan adalah sedikit dari sasaran pembangunan yang masih akan menjadi isu penting dan sulit dapat dicapai. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya seiring terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh: desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Untuk itu Kabupaten Gresik yang bervisi dinamis perlu segera mengagendakan arahan kebijakan jangka pendek dan panjang dalam rangka mengantisipasi hal tersebut.
4. Dalam pembangunan politik dalam negeri, tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pelebagaan demokratisasi; menyepakati kembali makna penting persatuan nasional; menyelesaikan masalah-masalah politik sensitif yang tersisa; menyempurnakan reformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri; menyelesaikan rekonsiliasi nasional; menjadikan pendidikan politik sebagai alat transformasi sosial menuju demokrasi; serta melembagakan kebebasan pers atau media massa.

Implikasi pada pembangunan di Kabupaten Gresik adalah timbulnya tuntutan menyesuaikan sistem-sistem infrastruktur dan suprastruktur politik daerah dalam rangka penyesuaian perubahan pada tingkat nasional tersebut, untuk itu diperlukan arahan kebijakan yang tepat.

5. Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman yang ditandai dengan menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Masalah ini semakin serius dengan semakin terbatasnya ruang publik yang dapat digunakan dan dikelola bersama masyarakat multikultur untuk penyaluran aspirasi. Masa depan akan terus meningkat kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat karena desakan ekonomi, hal demikian ini perlu dirumuskan arahan kebijakan solutifnya bagi Kabupaten Gresik.
6. Kebudayaan Indonesia yang bercirikan Bhineka Tunggal Ika telah berkembang sepanjang sejarah bangsa. Budaya bangsa Indonesia bersifat terbuka terhadap masuknya nilai positif budaya lain untuk mewujudkan jati diri dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Nilai budaya bangsa merupakan akar pandangan integralistik bangsa dan prinsip kekeluargaan sehingga sangat strategis untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebudayaan lokal Gresik juga perlu tegas merefleksi pada nilai nasional tersebut.
7. Di masa mendatang ada kecenderungan terjadinya krisis identitas nasional ditandai dengan semakin mudarnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah-tamahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah menjadi kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia. Demikian pula kebanggaan atas jati diri bangsa seperti penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar semakin menurun. Identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif serta kurang mampunya bangsa Indonesia menyerap budaya global yang lebih sesuai bagi pembentukan karakter bangsa. Kecenderungan negatif tersebut di atas juga harus diantisipasi Kabupaten Gresik, melalui perumusan arahan kebijakan pembangunan jangka pendek dan panjang.

8. Berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul pada saat dan pasca krisis 1997 terutama dengan meningkatnya utang pemerintah yang memerlukan pengelolaan jangka panjang yang tepat dengan tetap menjaga terwujudnya keberlanjutan fiskal, peningkatan disiplin pergaulan perekonomian global yang semakin tinggi serta mengarah pada ketidakpastian akhir-akhir ini, menjadi dasar utama perumusan arah kebijakan dan prioritas yang harus diambil dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemerintahan Kabupaten Gresik juga harus membuat arahan kebijakan dan prioritas pembangunannya.
9. Pola Kebijakan pembangunan nasional yang selama ini kurang memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan juga menimbulkan beberapa akses negatif dan melahirkan pola yang sama pada pembangunan daerah di Kabupaten Gresik, antara lain : menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, terjadinya pertumbuhan tak terkendali yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan; melebarnya kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan; meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita; masih banyaknya daerah-daerah miskin, tinggi pengangguran, serta rendah produktivitas, kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah, kurang adanya keterkaitan kegiatan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan; tingginya konversi lahan pertanian ke non pertanian; serta terabaikannya pembangunan daerah pesisir.
10. Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, bidang pertahanan dan keamanan nasional akan dihadapkan pada tantangan sebagai berikut :
 - a) Postur dan struktur pertahanan Indonesia saat ini belum cukup optimal dalam melindungi seluruh wilayah Indonesia maupun dalam melakukan operasi non-militer saat damai seperti ditunjukkan oleh kejadian konflik dan bencana alam, terlebih lagi untuk menjawab tantangan perubahan regional dan internasional. Postur dan struktur pertahanan Indonesia perlu disempurnakan dengan mengambil parameter utama yaitu kondisi geografis, peta politik regional dan global, perkembangan masalah aktual, kemajuan teknologi, serta dinamika masyarakat.

- b) Peningkatan profesionalisme SDM TNI. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara sangat bertumpu kepada kemampuan SDM dalam menjalankan tugasnya.
- c) Penyelesaian masalah aktual keamanan nasional. Tantangan pertahanan dan keamanan yang harus diatasi, selain ancaman perang modern dan terbatas dengan menggunakan alutsista yang canggih, juga meliputi *low intensity conflict* yaitu gerakan separatisme, terorisme dan gangguan keamanan dalam negeri lainnya; kejahatan transnasional; dan kejahatan terhadap kekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan wilayah perbatasan. Permasalahan aktual tersebut segera harus ditangani untuk mencegah eskalasi masalah menjadi ancaman laten yang melemahkan NKRI secara keseluruhan.
- d) Peningkatan kerjasama dan koordinasi keamanan nasional. Demikian kompleks dan luasnya dimensi permasalahan keamanan nasional memerlukan keterpaduan kebijakan, perencanaan, program, aksi, akses informasi, dan pengambilan keputusan bersama antara institusi penanggungjawab bidang pertahanan dan keamanan.

Perkiraan ancaman dan tantangan keamanan nasional tersebut di atas, jelas akan berdampak pula pada tingkat kestabilan lingkungan internal-eksternal pembangunan daerah Gresik, oleh karena itu perlu dipersiapkan arahan kebijakan yang mampu mencermati dan memahami suasana keamanan tersebut.

2.3. KONDISI DAN TANTANGAN REGIONAL

Adapun kondisi dan tantangan regional yang diperkirakan dapat menjadi hambatan, tantangan dan peluang bagi aksi pembangunan daerah Kabupaten Gresik masa 20 tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

1. Isu permasalahan yang cukup krusial dalam pembangunan propinsi Jawa Timur dan berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Gresik, yaitu adanya

kesenjangan pembangunan antar wilayah kabupaten. Kabupaten Gresik yang berada pada batas garis luar propinsi sekaligus dekat berhimpit dengan ibukota propinsi, menerima konsekuensi dampak langsung akibat fenomena kesenjangan antar wilayah yang terjadi, misalnya : luberan urbanisasi, modernisasi terlalu cepat, *shifting* lahan pertanian, dsb. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan regional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah kabupaten adalah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap wilayah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Untuk mengantisipasi kesenjangan antar wilayah dalam lingkup regional tersebut, Kabupaten Gresik perlu merumuskan agenda arahan kebijakan masa depan.

2. Isu regional lain yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Gresik adalah adanya tantangan dalam pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur terutama penduduk di wilayah- wilayah cepat tumbuh, salah satunya Kabupaten Gresik. Fenomenanya adalah statistik penduduk tumbuh tidak seimbang yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non produktif. Tantangan lainnya berkaitan dengan persebaran dan mobilitas penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang justru terjadi di daerah yang telah padat penduduknya, terutama daerah perkotaan, wilayah dengan industri besar, ibukota propinsi dan sekitarnya. Timpangnya persebaran dan kurang terarahnya mobilitas penduduk terkait erat dengan ketidakseimbangan persebaran sumber daya dan hasil pembangunan, jelas berpengaruh pada performa daerah seperti Kabupaten Gresik yang ingin terus menjaga akselerasi pembangunannya.
3. Di masa mendatang, intensitas pencemaran lingkungan yang berlevel regional akan cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh laju

pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan dan wilayah cepat tumbuh seperti Kabupaten Gresik. Sungai-sungai tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia, baik yang berasal dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) akan mempengaruhi kondisi lingkungan khususnya di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang daerah.

4. Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan. Disamping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana jalan berpengaruh pada berpengaruh pada pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi. Hal ini karena terbatasnya dana pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, antara nasional, propinsi, dan daerah menyangkut infrastruktur jalan tersebut.
5. Di masa depan, ketersediaan pangan semakin terbatas yang disebabkan oleh semakin meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktifitas hasil pertanian, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi. Kondisi pasokan air bagi lahan beririgasi semakin terbatas karena menurunnya kemampuan penyediaan air di waduk-waduk yang menjadi

andalan pasokan air. Sementara itu, daya saing produk pertanian dalam negeri masih rendah dibandingkan dengan produk luar negeri sehingga pasar produk pertanian dalam negeriibanjiri dengan produk impor. Dilihat dari aspek konsumsi pangan, ketergantungan pada konsumsi beras masih tinggi sehingga tekanan terhadap produksi padi semakin tinggi pula. Ke depan perlu didorong diversifikasi konsumsi pangan dengan mutu gizi yang semakin meningkat berbasiskan konsumsi pangan hewani, buah, dan sayuran. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga masih rentan yang disebabkan sistem distribusi yang kurang efisien untuk menjamin ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.

6. Dari sisi politis penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, telah memberikan ruang gerak kepada masyarakat di daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gresik juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); berkurangnya pengangguran; meningkatnya akses masyarakat kepada jaringan infrastruktur (khususnya transportasi dan telekomunikasi) maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun demikian peningkatan kondisi sosial dan ekonomi tersebut relatif masih belum merata dan sangat bervariasi antara wilayah yang satu dengan yang lain, untuk itu diperlukan arahan kebijakan yang cermat mempertimbangkan kondisi ini.

2.4. KONDISI DAN TANTANGAN LOKAL

Adapun kondisi dan isu-isu penting daerah yang diperkirakan dapat menjadi hambatan, tantangan dan peluang bagi aksi pembangunan daerah Kabupaten Gresik masa 20 tahun mendatang, adalah sebagai berikut :

1. Di masa jangka panjang, sumber daya alam daerah Kabupaten Gresik harus memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Peranan sumber daya alam dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Namun, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediannya sering diabaikan sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Dalam 20 tahun mendatang diperkirakan juga akan mengalami berbagai krisis yakni akan mengalami krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Ketiga ancaman krisis ini menjadi tantangan pembangunan jangka panjang yang harus diantisipasi secara dini agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Gresik.

2. Selain tantangan krisis di atas, hal lain yang menjadi tantangan ke depan bagi Kabupaten Gresik adalah berkaitan dengan pengembangan nilai tambah sumber daya alam dan penggalian sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru agar memiliki daya saing global dalam jangka panjang. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mempunyai peluang untuk dikembangkan adalah sumber daya kelautan. Bidang kelautan Kabupaten Gresik yang mencakup perhubungan laut, perikanan, pariwisata, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan harus dipersiapkan sebagai tumpuan masa depan. Oleh karena itu dalam jangka panjang diperlukan arahan kebijakan yang mendukung bidang kelautan ini, baik dukungan keputusan politik maupun pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Mengingat besarnya cakupan bidang kelautan dan prospek yang sangat luas maka kebijakan yang diperlukan tidak bersifat sektoral, namun multisektoral karena keterkaitan antar sektor yang sangat tinggi.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang mulai naik pesat mendorong penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian penting yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Di masa mendatang secara bertahap, struktur ekonomi daerah berubah dari yang semula didominasi oleh pertanian tradisional ke arah kegiatan ekonomi lebih modern dengan penggerak sektor industri. Ekspor non migas yang menunjukkan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan produk dan daya saing produk dalam negeri terhadap produk negara lain meningkat pesat. Di masa mendatang juga ada kecenderungan, terjadi perubahan

struktur ekspor dari yang semula didominasi oleh ekspor migas menjadi ekspor yang didominasi oleh ekspor non migas.

4. Dalam 20 tahun mendatang, beberapa tantangan yang dihadapi bidang kesehatan adalah masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi. Kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender, dan kelompok pendapatan masih terjadi. Ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan obat belum terjamin, sementara jumlah, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan masih belum memadai. Dalam hal pembiayaan, sumber pembiayaan kesehatan masih sangat terbatas dan alokasi pembiayaan kesehatan belum optimal.
5. Taraf pendidikan penduduk meningkat yang antara lain diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara. Kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan pedesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, antar jenis kelamin yang harus dapat diturunkan secara signifikan. Tantangan lain yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sehingga dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur serta daya saing yaitu memiliki etos kerja tinggi, produktif, kreatif dan inovatif.
6. Ancaman krisis air di Kabupaten Gresik disebabkan oleh memburuknya kondisi lahan berpohon akibat penggundulan yang meningkat pesat. Deforestasi ini disebabkan oleh peralihan fungsi kawasan hutan menjadi permukiman, pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Berkurangnya kawasan berpohon selanjutnya menyebabkan terganggunya kondisi tata air.

Gejala ini terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian, membesarnya aliran permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir pada musim penghujan. Sementara itu, laju kebutuhan air terus bertambah diperkirakan rata-rata sebesar 10 persen pertahun.

7. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas SDM membaik yang antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat. Namun demikian, kualitas SDM di Kabupaten Gresik masih harus ditingkatkan karena menurut standard Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional, angkanya masih rendah apalagi jika dibandingkan dengan indeks negara-negara tetangga ASEAN. Rendahnya kualitas SDM ini menyebabkan rendahnya produktifitas dan daya saing dalam berkompetisi dan merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dalam 20 tahun mendatang.
8. Dewasa ini, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik di Kabupaten Gresik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antar ummat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian tantangan untuk masa mendatang adalah bahwa peningkatan kesadaran tersebut belum sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku asusila, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, perjudian, tingginya angka perceraian dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Selanjutnya upaya membangun kerukunan intern dan antar ummat beragama juga belum berhasil dengan baik terutama di tingkat masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai ethos kerja, penghargaan pada prestasi

dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, akhlak mulia belum terinternalisasi dalam setiap individu.

9. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik telah menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan program-program pembangunan yang makin responsif gender serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Demikian pula antisipasi pemuda dalam pembangunan makin membaik seiring dengan budaya olahraga yang makin meluas di masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat telah meningkat dengan adanya pemberdayaan, pelayanan rehabilitasi, perlindungan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun untuk pembangunan jangka panjang masih terdapat tantangan lain yaitu berkaitan dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, dengan masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang antara lain ditandai oleh rendahnya nilai IPG, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan daerah. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, kurang optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, masih rendahnya budaya dan prestasi olahraga, serta masih banyaknya permasalahan sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam, dan gejala disintegrasi sosial.
10. Pada tingkat keluarga dan komunitas, globalisasi lebih nampak membawa dampak negatif. Dengan deras dan langsungnya informasi sampai rumah, membahayakan tatanan nilai sosial budaya yang ada selama ini. Budaya asing sungguh sangat cepat masuk pada keluarga-keluarga tanpa mampu terfiltrasi. Tayangan-tayangan TV, iklan, dan berita-berita dengan cepat berpengaruh pada adat sopan santun, tata krama, norma, prinsip, ideologi bahkan pemahaman agama. Manifestasinya kemudian adalah terjadinya kerusakan moral, disorganisasi pranata sosial, perilaku

menyimpang bahkan terancamnya adat dan seni leluhur. Di masa mendatang hal ini jelas akan membawa dampak lebih buruk secara sosial dan budaya, oleh karenanya perlu arahan kebijakan bagaimana untuk mensikapinya.

11. Industrialisasi merupakan proses yang memang diharapkan pertumbuhannya di Kabupaten Gresik. Proses ini merupakan wujud adanya dinamisasi perkembangan ekonomi daerah. Namun demikian, sebagaimana stereotipe dimanapun terjadi, industrialisasi membawa dampak ekonomi negatif. Industrialisasi hanya menjadi peluang bagi individu yang *skilled* dan diskriminatif bagi insan yang tidak terpelajar dan tidak terampil, dampaknya terjadi semakin lebar kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan antar kelompok dan wilayah. Dampak lain adalah terjadinya pergeseran okupasi mata pencaharian individu dan kelompok masyarakat, bahkan terjadi tatanan nilai, norma dan pranata-pranata sosial ekonomi masyarakat. Perubahan juga terjadi secara fisik misalnya konversi secara besar-besaran lahan pertanian menjadi fungsi lain yang kemudian berkembang lagi menjadi bencana. Industrialisasi kiranya juga membawa dampak sosial, dalam bentuk perubahan segregasi penduduk dan urbanisasi. Oleh karena itu perkembangan lebih lanjut di masa mendatang perlu direncanakan secara cermat dan taat panduan.
12. Semenjak undang-undang tentang otonomi diberlakukan, terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah daerah segera mensikapi dengan mencari terobosan-terobosan, namun demikian terkadang terjadi euforia berlebihan melebihi kewenangannya. Demi memacu masuknya investasi, pemerintah Kabupaten menetapkan berbagai peraturan daerah, akan tetapi justru terjadi konflik kewenangan. Banyak produk hukum daerah tidak sinkron dengan peraturan perundangan di atasnya. Demikian pula akibat penerjemahan otonomi yang berlebihan, desa justru menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif, misalnya dengan mengeluarkan peraturan desa yang pada gilirannya hanya menambah keruwetan prosedur birokrasi dan biaya investasi.

Fenomena dampak euforia otonomi daerah seperti ini cenderung tambah rumit di masa mendatang, oleh karenanya perlu dicarikan solusinya.

13. Arah perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Gresik yang selama ini nampak adalah pada pertumbuhan industri dan jasa perdagangan. Sebagai wilayah yang berhimpit dengan kota metropolitan Surabaya, sektor jasa dan perdagangan akan terus meningkat seperti : jasa pergudangan, pelabuhan, forwarding, jasa ekspor dan impor, dsb. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, beberapa isu permasalahan muncul, antara lain : volume alat transportasi meningkat pesat, kerusakan jalan, polusi emisi kendaraan, demikian juga reaksi oportunistik aparat birokrasi. Reaksi terhadap perkembangan jasa dan perdagangan ini juga terjadi di tingkat desa, banyak sekali muncul peraturan desa yang bersifat kutipan, retribusi, bahkan pemalakan. Oleh karena itu sangat diperlukan di masa mendatang upaya evaluasi dan sinkronisasi perdes-perdes tersebut dengan peraturan perundangan di atasnya, yaitu peraturan daerah.
14. Posisi strategis Kabupaten Gresik sebagai wilayah penyangga metropolitan Surabaya membawa dampak positif sekaligus negatif. Hampir keseluruhan jenis dan kompleksitas problem kota Surabaya juga terjadi di Kabupaten Gresik, misalnya : urbanisasi, kampung kumuh, kriminalitas, pencemaran lingkungan udara dan tanah, hingga konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Tak pelak, Kabupaten Gresik juga harus segera mencari terobosan penanganan solutif sebagai kawasan strategis dan cepat tumbuh tersebut, termasuk program penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh di perkotaan diteruskan, serta berbagai peraturan pelaksanaan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang perlu diselesaikan dan dilaksanakan. Hal demikian ini jelas memerlukan pedoman rencana dalam jangka waktu panjang.
15. Isu lokal pembangunan daerah di Kabupaten Gresik adalah rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya.

Keinginan untuk segera memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk gampang mengeluarkan ijin lokasi dan investasi, efek yang muncul kemudian adalah banyaknya lahan tidur, dan investor spekulatif. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan '*Rencana Tata Ruang*' sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Sehingga pusat-pusat pertumbuhan tidak merata dan tidak teralokasi secara proporsional, hanya menumpuk di pusat kota saja.

16. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik adalah stereotipe dengan wilayah lain di Indonesia. Sebagian besar dari angkatan kerja yang tersedia bekerja pada lapangan kerja iformal, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah adalah lulusan sekolah dasar ke bawah, serta sebagian besar berusia muda. Berkaitan dengan peluang kerja di manca negara, masalah umum yang dihadapi pada bidang tenaga kerja adalah kurang tercukupinya tenaga kerja yang terlatih secara profesional untuk dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja asing tersebut. TKI yang berangkat bekerja di luar negeri berkualitas rendah dan tidak terampil. Hal ini disebabkan kurang tersedianya lembaga pelatihan dan keterampilan, kurang optimalnya lembaga-lembaga ketenagakerjaan serta belum sempurnanya sistem informasi manajemen kependudukan. Sementara lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah juga mengakibatkan pula rendahnya penciptaan lapangan kerja.
17. Permasalahan yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah rendahnya sumber-sumber keuangan telah menyebabkan ketergantungan keuangan yang tinggi kepada Pusat. Perimbangan keuangan daerah tidak akan efektif dan efisien sepanjang belum diupayakan adanya reaktualisasi otonomi daerah dan pembuatan standar-standar pembiayaan untuk pelaksanaan urusan-urusan otonomi tersebut. Secara empirik sistem perimbangan keuangan selama ini lebih bertumpu pada sistem subsidi. Secara empirik pula, pendekatan perimbangan keuangan yang lebih memberikan dominasi

Pusat untuk menguasai sumber keuangan telah mengakibatkan terjadinya *bias of allocation* dengan memberikan akses pendanaan yang lebih besar kepada departemen pusat dan kanwil serta kandepnya di daerah. Dalam era reformasi, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih bertumpu pada sistem grant akan kurang kondusif untuk memberdayakan kemandirian pemda, karena pemda menjadi kurang kreatif dan inovatif. Hal demikian berdampak pada rasio yang sangat senjang antara APBD dengan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu solusi yang mungkin ditawarkan adalah mengupayakan evaluasi dan kemudian melakukan sinkronisasi produk-produk hukum daerah dengan pusat, terutama yang berkaitan dengan potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan.

18. Bawean merupakan wilayah Kabupaten Gresik yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat Bawean pada umumnya lebih belum tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah Gresik daratan. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat Bawean seperti : orang tua, Janda Malaysia (Jamal) memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Bawean, antara lain : (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan Bawean dengan wilayah Gresik daratan yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan Bawean oleh pemerintah daerah karena dianggap sulit menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung; (5) Bawean memiliki potensi pariwisata namun belum optimal dikembangkan karena belum mendapat dukungan sektor terkait untuk pengembangannya.
19. Kasus-kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Gresik masa mendatang akan cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak

negatif terutama pada lingkungan wilayah perkotaan. Luas wilayah yang tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga akan semakin besar. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan juga oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

20. Pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gresik selama ini juga masih memunculkan isu kesenjangan seperti :
- (a) kesenjangan pembangunan antar kecamatan (*local disparity*);
 - (b) penumpukan kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja (*centralization of economic activities*);
 - (c) terjadinya wilayah cepat tumbuh yang tidak terkendali (*unsustainable urbanization*) yang mengakibatkan kualitas lingkungan daerah secara rata-rata semakin menurun;
 - (d) kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan (*urban-rural economic imbalances*) juga terjadi di Kabupaten Gresik;
 - (e) kesenjangan pendapatan perkapita (*income per capita inequality*);
 - (f) terdapatnya daerah-daerah miskin, tinggi pengangguran, serta rendah produktifitas (*income per capita pf productivity's region*). Kesenjangan pembangunan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat apabila faktor-faktor penyebabnya tidak ditangani secara mendasar. Pengurangan kesenjangan tersebut perlu segera dilakukan untuk menjaga stabilitas daerah. Tujuan penting dan mendasar yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan adalah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) antar wilayah.
21. Meningkatnya kegiatan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, terutama yang disediakan alam dan memberi dampak negatif pada ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kecenderungan ini tercermin dari meningkatnya kegiatan eksplorasi

dan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan tekanan terhadap keberadaan sumber daya alam. Hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya alam, yang pada akhirnya menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan manusia. Laju deforestasi meningkat pesat sementara kemampuan merehabilitasi jauh dari angka deforestasi tersebut. Demikian pula konversi lahan pertanian untuk penggunaan lain seperti permukiman dan industri juga semakin tidak terkendali. Ditambah lagi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus pencemaran sebagai dampak dari perkembangan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih. Keadaan ini akan memicu terjadinya berbagai krisis kelangkaan sumber daya, khususnya krisis sumber daya pokok bagi kelangsungan kehidupan yaitu krisis air bersih dan justru sebaliknya menimbulkan bencana alam bahkan rutin, banjir.

22. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik dirasakan masih mengalami hambatan sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk tidak dapat diimbangi oleh kemampuan penyediaannya. Kondisi infrastruktur yang ada tidak dapat dipelihara dengan baik sehingga banyak terjadi kerusakan. Tingkat kerusakan jaringan transportasi cukup parah. Penyediaan perumahan serta air minum dan penyehatan lingkungan menjadi terhambat. Kesemuanya ini dapat mengganggu daya dukung pembangunan sosial ekonomi. Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian nasional, pembangunan infrastruktur mulai dapat dilakukan lagi meskipun belum dapat sepesat seperti sebelum krisis. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembangunan infrastruktur pada masa depan harus lebih diselaraskan dengan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan pelaksanaan otonomi daerah yang membagi kewenangan pusat dalam pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana ekonomi. Pembangunan infrastruktur juga harus disesuaikan dengan perkembangan global, terutama dengan makin

pesatnya arus informasi dunia. Semua ini menjadi justifikasi perlu direncanakannya pembangunan jangka panjang.

23. Pembangunan ekonomi (industrialisasi) dan perkembangan globalisasi yang kurang diimbangi dengan pembangunan karakter sosial masyarakat, melahirkan berbagai krisis yaitu : (1) krisis identitas yang berakibat semakin menurunnya kebanggaan akan ciri lokal. Sebagian masyarakat di Kabupaten Gresik tidak bangga bahkan tidak tahu bila mereka memiliki ciri lokal sebagai “kota santri”, karakter ini semakin hilang terpengaruh oleh dampak ikutan industrialisasi; (2) krisis moral dalam bentuk merebaknya upaya memperkaya diri dengan cara yang tidak sah (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang mengakibatkan rusaknya tatanan dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat; (3) krisis budaya yang berjudul semakin lemahnya ketahanan budaya terutama ketika berhadapan dengan derasnya arus budaya global yang melahirkan sikap permisif, hedonis dan materialis yang berlebihan sehingga terkadang melanggar kesusilaan dan nilai ketimuran, dan memperparah krisis sosial.

2.5. MODAL DASAR

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, keseluruhan potensi pembangunan akan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Potensi pembangunan ini harus dikelola dan diberdayakan secara tepat, sehingga benar-benar dapat dipergunakan untuk mengatasi hambatan yang ada saat ini.

Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah/kawasan penyanggah (*buffer zone*) dari kota Surabaya. Dimana Kota Surabaya adalah ibukota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan Kawasan Indonesia Timur. Disamping Kabupaten Gresik daerah lain yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyanggah Kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan. Keenam wilayah ini dikenal dengan istilah Gerbangkertosusilo. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik

dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Surabaya. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis.

Di luar faktor Kabupaten Gresik sebagai wilayah penyanggah Kota Surabaya, secara umum, setidaknya Kabupaten Gresik memiliki beberapa faktor strategis yang merupakan keunggulan dan alternatif terbaik untuk berinvestasi atau menanamkan modal, yaitu karena :

1. Pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik dalam tiga tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, meski secara nasional Indonesia masih mengalami krisis ekonomi. Dibanding Tahun 2001 pada Tahun 2002 untuk industri besar mengalami kenaikan 22 persen yaitu dari 472 unit menjadi 531 unit, sedang industri kecil meningkat 2,6 persen dari 4.772 unit. Begitu pula untuk nilai investasi, nilai produksi dan penyerapan tenaga kerjanya, semuanya mengalami kenaikan. (angka-angka pastinya dapat dilihat pada tabel III-1). Pertumbuhan industri yang positif ini turut mendorong pertumbuhan nilai ekspor yang sangat tinggi bagi Kabupaten Gresik. Dimana pada Tahun 2002 nilai ekspor dari kegiatan industri dan perdagangan dari Kabupaten Gresik mencapai 1,7 milyar dollar AS, meningkat 60 % dibanding Tahun 2001 yang realisasi eksportnya hanya 1 milyar dollar AS.
2. Sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Surabaya mengalami kejenuhan. Disamping itu Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten yang berpengalaman di dalam mengelola kegiatan industri besar dan telah memiliki reputasi nasional hingga internasional selama puluhan tahun, seperti industri Semen Gresik dan Petrokimia.
3. Dukungan sarana dan prasarana transportasi darat, seperti : akses jalan tol menuju kota Surabaya, jarak yang relatif dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, jalan beraspal dan angkutan umum ke seluruh pelosok wilayah kecamatan, dan transportasi laut yang memadai dan siap menunjang aktifitas perdagangan dalam taraf internasional, sebagaimana rencana meningkatkan kapasitas Pelabuhan Kalimiring

yang dikelola oleh PT. Pelindo III, salah satu pelabuhan atau dermaga yang ada di Kabupaten Gresik, untuk menjadi pelabuhan yang bertaraf internasional di masa mendatang bukan hanya untuk memenuhi jasa angkut penumpang.

4. Untuk wilayah Jawa Timur, Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten satu-satunya, di luar Kota Surabaya, yang memiliki pelabuhan khusus kegiatan industri yang dapat digunakan bongkar muat dalam skala besar seperti log dan kayu masak, plywood, bahan baku batu bara/BBM, semen, pupuk, dan hasil industri lainnya serta aktifitas penumpang umum meskipun belum setaraf pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Beberapa pelabuhan atau dermaga yang dimiliki seperti dermaga milik PT. Petrokimia dapat disandari kapal sampai 40.000 DWT. Dermaga PT. Semen Gresik 10.000 DWT, sedang dermaga-dermaga swasta lainnya hanya bisa disandari kapal 10.000 DWT ke bawah.
5. Kondisi sosial-politik yang kondusif di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang paling aman dan sedikit mengalami aksi-aksi sosial atau kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh buruh industri.

BAB 3

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025

3.1. VISI PEMBANGUNAN

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana suatu proses pemerintahan dan pembangunan menuju agar dapat eksis, antisipatif, dan berkelanjutan. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gresik untuk masa tahun 2005-2025.

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang diperkirakan muncul dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 adalah :

**“GRESIK YANG AGAMIS, DINAMIS, DEMOKRATIS, ADIL, AMAN,
DAN SEJAHTERA”**

3.2. MISI PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan Misi yang jelas. Rumusan misi pada hakekatnya merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran pokok yang ingin dicapai dari suatu proses pembangunan. Dalam hal ini, pernyataan misi membawa proses pembangunan dan kinerja pemerintahan Kabupaten Gresik 2005-2025 kepada suatu fokus.

Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh proses pembangunan dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan dalam pencapaian hal tersebut. Misi memperlihatkan secara jelas

hal apa yang penting bagi proses pembangunan dan apa bidang kegiatan dari aktifitas pembangunan tersebut. Misi sebagai pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja dan merupakan pernyataan tentang arah jangka panjang pembangunan yang bersumber dari nilai yang dicita-citakan masa datang.

Untuk mewujudkan visi **GRESIK YANG AGAMIS** dalam 20 tahun mendatang ditempuh dengan **MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 2005-2025** sebagai berikut :

MISI 1 :

Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlaq Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatkan kualitas moral aparatur.

Untuk mewujudkan visi **GRESIK YANG DINAMIS** dalam 20 tahun mendatang ditempuh dengan **MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 2005-2025** sebagai berikut :

MISI 2 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri.

MISI 3 :

Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan.

MISI 4 :

Mengembangkan Sumber Daya Alam dan Buatan yang Didukung Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk mewujudkan visi **GRESIK YANG DEMOKRATIS** dalam 20 tahun mendatang ditempuh dengan **MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 2005-2025** sebagai berikut :

MISI 5 :

Memantapkan Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Untuk mewujudkan visi **GRESIK YANG ADIL** dalam 20 tahun mendatang ditempuh dengan **MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 2005-2025** sebagai berikut :

MISI 6 :

Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional.

Untuk mewujudkan visi **GRESIK YANG AMAN** dalam 20 tahun mendatang ditempuh dengan **MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 2005-2025** sebagai berikut :

MISI 7 :

Meningkatkan Kemampuan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kondisi Lingkungan Daerah yang Tertib, Tenatram dan Damai.

Untuk mewujudkan visi **GRESIK YANG SEJAHTERA** dalam 20 tahun mendatang ditempuh dengan **MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 2005-2025** sebagai berikut :

MISI 8 :

Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi.

MISI 9 :

Meningkatkan Kesadaran dan Perilaku Konstruktif Masyarakat dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan serta Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

BAB 4

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

4.1. ARAH PEMBANGUNAN

GRESIK YANG AGAMIS adalah wujud masyarakat Gresik di masa 20 tahun mendatang yang mencirikan karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlaq mulia serta berkehidupan harmonis, demikian pula didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Tewujudnya Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlaq Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatnya kualitas moral aparatur dicapai melalui : Peningkatan kualitas kehidupan beragama, Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah, Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, diwujudkan dengan :
 - (a). Meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas kemudahan ummat dalam menjalankan ibadahnya;
 - (b). Mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di dalam keluarga dan sekolah-sekolah menuju terwujudnya generasi muda yang berakhlaq mulia.
2. Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar ummat beragama, diwujudkan dengan :
 - (a). Mendorong upaya peningkatan kualitas kerukunan hidup antar ummat beragama;
 - (b). Mendorong upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
 - (c). Mengembangkan kesadaran diri mengenai realitas multikulturalisme dan makna kemajemukan sosial;
 - (d). Mendorong upaya penciptaan suasana

kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

3. Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah, diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya internalisasi norma keagamaan sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pembangunan; (b). Mengembangkan etika perilaku amanah dalam keseharian pelayanan publik.
4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah diwujudkan dengan : (a). Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; (b). Mendorong upaya pengembangan sikap aparatur daerah yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggungjawab dalam bentuk perilaku yang teladan.
5. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah pada tingkatan individual maupun sebagai bagian dari suatu organisasi; (b). Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan penguatan lembaga legislatif; (c). Meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

GRESIK YANG DINAMIS adalah perwujudan dari pertumbuhan dan perkembangan kemampuan ekonomi daerah di masa 20 tahun mendatang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sumber daya alam maupun buatan yang maju berbasiskan IPTEK.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, Profesional, Produktif, Kreatif, Responsif dan Mandiri dicapai melalui : Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang merata dan bermutu, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Peningkatan peranan komunikasi dan informasi, serta Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

1. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang merata dan bermutu diwujudkan dengan : (a). Membentuk Manusia Gresik yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan luas kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu pengelolaan pendidikan dimantapkan agar efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *link and matc*, manajemen berbasis mutu dan keahlian, serta *demand driven* untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa depan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya peningkatan kesehatan keluarga, pembiayaan kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan lain; (b). Pemberdayaan kelompok masyarakat desa dan mensosialisasikan manajemen kesehatan; (c). Mengembangkan sistem pemantauan kesehatan masyarakat dengan perhatian pada dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan; (d). Mendorong upaya promotif dan preventif yang bertujuan peningkatan perilaku sehat masyarakat secara mandiri; (e). Meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan daerah tertinggal; (f). Mendorong munculnya kerjasama lintas sektoral dan kemitraan pengembangan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya.
3. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi diwujudkan dengan : (a). Menekankan pada paradigma pencerdasan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik; (b). Mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga dan bertanggungjawab; (c). Menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara demokratis; (d). Mewujudkan pemerataan informasi dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah; (e). Menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik agar kebijakan yang diambil lebih mudah dipahami masyarakat luas; (f). Memanfaatkan jaringan teknologi informasi yang lebih memadai kepada masyarakat Gresik.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diwujudkan

dengan : (a). Mengembangkan kerangka peraturan daerah yang mendorong pembangunan sumber daya manusia; (b). Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Daerah untuk Tumbuh dan Berkembang secara Berkelanjutan dicapai melalui : Pengembangan perekonomian daerah, Pembangunan Perindustrian, Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di Gresik, Pengembangan jasa dan perdagangan, Peningkatan gairah iklim usaha daerah, Pengembangan UKM dan Koperasi menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif, Pembangunan pariwisata menjadi sektor andalan yang mendukung kegiatan ekonomi dan sektor lain, Pengelolaan keuangan daerah secara efektif, dan Peningkatan dinamisasi kinerja pertanian.

1. Pengembangan perekonomian daerah diwujudkan dengan : (a). Menekankan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat sebagai azas perekonomian daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik secara adil dan merata; (b). Mengacu pada kebijakan perekonomian yang berorientasi pada dinamika globalisasi, komitmen dan kepentingan strategis nasional serta berbagai fora perjanjian ekonomi internasional.
2. Pembangunan Perindustrian diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya penguatan struktur perekonomian daerah yang mendukung sektor industri sebagai motor penggerak dan didukung oleh kegiatan pertanian; (b). Mendorong sektor industri untuk menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan; (c). Mengembangkan jasa-jasa pelayanan yang efektif menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik untuk tujuan terwujudnya ketahanan ekonomi daerah yang tangguh; (d). Mendorong upaya peningkatan kinerja perindustrian sebagai pemacu akselerasi perekonomian daerah namun tetap berwawasan lingkungan.
3. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan

- potensi di Gresik diwujudkan dengan : (a). Mendorong pertumbuhan kluster-kluster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing wilayah; (b). Mendorong upaya pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi kluster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif.
4. Pengembangan jasa dan perdagangan diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa, tertib niaga, dan kepastian berusaha; (b). Mendorong upaya peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir di Kabupaten Gresik.
5. Peningkatan gairah iklim usaha daerah diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya pemberian kemudahan berbagai regulasi perijinan daerah; (b). Mengembangkan berbagai paket insentif yang dirumuskan secara selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing dari produk-produk industri.
6. Pengembangan UKM dan Koperasi menjadi pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas usaha kecil, menengah dan koperasi; (b). Mendukung upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi tepat guna.
7. Pembangunan pariwisata menjadi sektor andalan yang mendukung kegiatan ekonomi dan sektor lain diwujudkan dengan : (a). Mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah dari usaha pariwisata namun sekaligus mewaspadaikan dampak negatif yang ditimbulkannya; (b). Mendukung pariwisata berfungsi sebagai media dalam rangka memperkenalkan alam dan kebudayaan asli masyarakat Kabupaten Gresik.
8. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan : (a). Menekankan pada paradigma sistem anggaran daerah yang transparan dan bertanggungjawab; (b). Menjamin efektifitas pemanfaatan anggaran daerah untuk tujuan peningkatan pelayanan publik, penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya

saing ekonomi; (c). Menerapkan sistem pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

9. Peningkatan dinamisasi kinerja pertanian diwujudkan dengan :
- (a). Pengembangan agrobisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan; (b). Revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM pelaku usaha pertanian agar mampu meningkatkan produktifitas serta merespon permintaan pasar; (c). Mendorong upaya peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya dan petani nelayan pada khususnya; (d). Mewujudkan diversifikasi perekonomian perdesaan untuk tujuan penciptaan ketahanan ekonomi desa; (e). Mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara terarah serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan usaha pertanian yang tidak adil.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Berkembangnya Sumber Daya Alam dan Buatan yang Didukung Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dicapai melalui : Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global, Pengembangan sumber daya buatan, Pengembangan jaringan infrastruktur perhubungan, Pengembangan kelistrikan daerah, Pengembangan telematika, serta Pengembangan sumber daya air.

1. Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global diwujudkan dengan : (a). Mendukung upaya transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif; (b). Mendorong upaya peningkatan produktifitas ekonomia daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) ilmu pengetahuan dan teknologi; (c). Mengembangkan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik; (d). Mendukung upaya pengelolaan secara berkelanjutan sumberdaya alam sebagai modal kompetensi dan keunggulan daerah.
2. Pengembangan sumber daya buatan diarahkan : (a). Memanfaatkan seoptimal

mungkin data dan informasi, penerapan dan pengembangan iptek, pengaturan hukum, serta administrasi pembangunan secara terpadu dan saling mendukung, guna mencapai nilai tambah yang setinggi-tingginya.

3. Pengembangan jaringan infrastruktur perhubungan diwujudkan dengan :
(a). Mendorong upaya integrasi fungsi pelabuhan dan jalan raya dalam sistem jaringan inter dan antar-moda; (b). Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan dalam dan dengan luar wilayah Kabupaten Gresik dengan tingkat keselamatan, jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar nasional; (c). Mendorong upaya penciptaan sistem transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman, ekonomis, terpadu dan efisien guna menunjang dinamika pembangunan, mobilitas manusia, barang, dan jasa; (d). Mendukung pola distribusi, serta pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan antar pelosok desa dan antara pelosok desa dengan daerah lainnya.
4. Pengembangan kelistrikan daerah diwujudkan dengan : (a). Mendukung upaya pemenuhan pasokan tenaga listrik secara memadai sesuai permintaan kebutuhan tenaga listrik termasuk elektrifikasi rumah tangga, perkotaan dan perdesaan; (b). Mewujudkan sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada energi alternatif selain energi fosil untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.
5. Pengembangan telematika diwujudkan dengan mendorong upaya peningkatan kemampuan penggunaan telematika dalam aktifitas keseharian masyarakat dan pemerintah sehingga berdaya saing dan mampu mengatasi serta memanfaatkan arus globalisasi.
6. Pengembangan sumber daya air diwujudkan dengan : (a). Mendukung upaya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; (b). Mendorong upaya pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat; (c). Meningkatkan pengendalian daya rusak air yang mampu melindungi keselamatan jiwa dan harta benda penduduk.

GRESIK YANG DEMOKRATIS merupakan proyeksi dari sistem dan proses demokrasi konstitusional dan etika politik dalam pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Gresik di masa 20 tahun mendatang, yang ditandai dengan terjadinya

peningkatan peran serta masyarakat di segala bidang kehidupan dan dalam suasana yang kondusif sesuai hak dan kewajiban.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Mantapnya Demokrasi Konstitusional dan Etika Politik dalam Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta meningkatnya peran serta masyarakat dicapai melalui : Pengembangan demokrasi konstitusional di daerah dan Peningkatan intensitas pemberdayaan masyarakat.

1. Pengembangan demokrasi konstitusional di daerah diwujudkan dengan :
 - (a). Mendukung upaya penyempurnaan struktur politik lokal;
 - (b). Mengembangkan pendidikan politik di daerah;
 - (c). Mewujudkan penataan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
 - (d). Mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi keadilan, legal dan konstitusional;
 - (e). Meningkatkan peran komunikasi dan informasi antar elemen politik daerah.
2. Peningkatan intensitas pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan :
 - (a). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 - (b). Meningkatkan akses pada modal usaha dan sumber daya alam;
 - (c). Memberikan kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut hak, kewajiban dan kehidupan mereka;
 - (d). Meningkatkan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

GRESIK YANG ADIL merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional di masa 20 tahun mendatang, yang didukung oleh tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam sistem perundangan daerah yang akomodatif dan aspiratif.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Tegaknya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Perundangan Daerah yang Akomodatif dan Aspiratif serta meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara merata dan proporsional dicapai melalui : Penerapan hukum dan hak asasi manusia, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Peningkatan kesejahteraan

aparatur hukum, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum pemerintahan, Peningkatan penyelenggaraan dan Pembangunan pemerintah daerah, Pengembangan sistem pengelolaan peratanahan, Pembangunan perumahan, serta Pembangunan bidang pekerjaan umum.

1. Penerapan hukum dan hak asasi manusia diwujudkan dengan : (a). Mendukung upaya penegakan secara tegas, lugas, dan profesional dengan tetap berdasarkan pada keadilan dan kebenaran; (b). Mendukung setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan kasus-kasus HAM yang transparan, dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial; (c). Mengorientasikan penerapan Hukum dan HAM sebagai upaya pembangunan daerah dan penciptaan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis.
2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat diwujudkan dengan : (a). Membuka seluas-luasnya peluang akses terhadap segala informasi hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat; (b). Memberikan akses kepada masyarakat untuk tujuan pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah; (c). Mendorong upaya sosialisasi hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sehingga terbentuk perilaku taat hukum; (d). Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit; (e). Mendukung upaya penetapan putusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
3. Peningkatan kesejahteraan aparatur hukum diwujudkan dengan : (a). Mendukung upaya peningkatan pendapatan aparatur hukum untuk lebih sejahtera dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak tertentu dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme; (b). Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana hukum secara memadai agar pelaksanaan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik.
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum pemerintahan diwujudkan dengan : (a). Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif; (b). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur administrasi pemerintahan

- pada semua tingkat dan antar tingkat pemerintahan; (c). Penataan dan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan publik; (d). Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.
5. Peningkatan penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah diwujudkan dengan : (a). Mewujudkan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, sekaligus katalisator pembangunan di berbagai tingkatan pelayanan publik; (b). Mendorong upaya penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi aktifitas pemerintahan dan pembangunan.
6. Pengembangan sistem pengelolaan pertanahan diwujudkan dengan : (a). Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform*, serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; (b). Mendorong upaya penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat, serta peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan, maupun *alternative dispute resolution*; (c). Mendorong upaya penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah utamanya dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang pertanahan di daerah; (d). Mendukung terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif dan adil; (e). Mendukung penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
7. Pembangunan perumahan diwujudkan dengan : (a). Pengembangan konsep hunian yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; (b). Mendukung pembangunan perumahan dan permukiman dengan prasarana dan sarana yang mencukupi serta memperhatikan fungsi

dan keseimbangan lingkungan hidup.

8. Pembangunan bidang pekerjaan umum diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya peningkatan ketersediaan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum yang efektif, efisien, dan berkelanjutan demi menunjang roda perekonomian masyarakat.

GRESIK YANG AMAN merupakan kondisi stabilitas dan lingkungan daerah yang tertib, tenteram, dan damai di masa 20 tahun mendatang yang akan dicapai melalui upaya terus-menerus peningkatan kapasitas, sinergitas dan koordinasi antar komponen kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Meningkatkan Kemampuan Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kondisi Lingkungan Daerah yang Tertib, Tenteram dan Damai dicapai melalui : Pembangunan keamanan daerah, Pembangunan kebersamaan hidup bermasyarakat, dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan keamanan.

1. Pembangunan keamanan daerah diwujudkan dengan : (a). Menekan upaya kejahatan konvensional serta mengurangi potensi konflik horizontal antar masyarakat yang timbul berdasarkan suku, agama, dan ras; (b). Mendukung pemantapan fungsi kepolisian di daerah dalam rangka menangani kejahatan konvensional; (c). Mewujudkan kondisi lingkungan daerah yang tertib, tenteram, dan damai dengan menekankan pada upaya pembinaan masyarakat, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, melakukan respon cepat dan tanggap dalam menangani permasalahan keamanan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang merupakan subjek dan objek kriminalitas; (d). Melibatkan seluruh potensi Hankam daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terarah; (e). Mengembangkan sistem pertahanan rakyat semesta yang dibangun melalui pelibatan seluruh warga, dan sumber daya daerah lainnya, diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan; (f). Meningkatkan koordinasi antara institusi dan elemen pertahanan dan keamanan di daerah secara terus-menerus meliputi TNI, Polri, Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat dan komponen

pendukung Hankam lainnya dalam upaya menanggulangi masalah aktual keamanan daerah khususnya : masalah terorisme, konflik horisontal, dan kriminalitas sehingga dapat memantapkan kondisi keamanan daerah.

2. Pembangunan kebersamaan hidup bermasyarakat diwujudkan dengan :
(a). Mengembangkan berbagai wujud ikatan kebangsaan baik yang bersifat emosional maupun rasional; (b). Meningkatkan pembangunan pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multi kultur.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penciptaan keamanan diwujudkan dengan : (a). Mengembangkan mekanisme peran serta masyarakat untuk turut bertanggungjawab dan berperan aktif dalam penciptaan keamanan dan ketertiban; (b). Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan polisi dan komponen hankam lainnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

GRESIK YANG SEJAHTERA merupakan perwujudan tingkatan taraf hidup masyarakat secara optimum dan berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi di Kabupaten Gresik masa 20 tahun mendatang dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, serta didukung oleh kesadaran dan perilaku konstruktif masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dan Mengurangi Kesenjangan Sosial Ekonomi. dicapai melalui : Meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemberdayaan peran perempuan, Pembangunan pemuda dan olahraga, Pembangunan kesejahteraan sosial, Pengembangan sistem jaminan sosial, dan Pembangunan sistem ketahanan pangan.

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan upaya penciptaan sebanyak mungkin peluang dan lapangan kerja formal maupun informal; (b). Mendorong upaya peningkatan produktifitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi pula; (c). Meningkatkan dukungan program-program pelatihan strategis dengan tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber

- daya manusia; (d). Mengembangkan sistem pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global; (e). Mengembangkan pasar kerja yang fleksibel, keselamatan kerja yang memadai, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antar semua pihak yang berkepentingan.
2. Pemberdayaan peran perempuan diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan perempuan di berbagai bidang pembangunan; (b). Menurunkan intensitas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (c). Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di daerah.
 3. Pembangunan pemuda dan olahraga diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan; (b). Peningkatan budaya dan prestasi olah raga.
 4. Pembangunan kesejahteraan sosial diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (b). Memantapkan dukungan sistem hukum dan perlindungan sosial; (c). Menyediakan sarana pelayanan sosial yang memadai; (d). Meningkatkan derajat ketahanan sosial melalui pembentukan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat; (e). Memantapkan mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap; (f). Membina kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
 5. Pengembangan sistem jaminan sosial diwujudkan dengan : (a). Mengembangkan mekanisme pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi lemah (tidak mampu) hingga sesuai dengan martabat kemanusiaan; (b). Mengembangkan budaya tolong-menolong sebagai tradisi yang telah berakar di masyarakat.
 6. Pembangunan sistem ketahanan pangan diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan kemampuan untuk menjaga kemandirian pangan daerah; (b). Mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan hingga mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga; (c). Mengembangkan dukungan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Konstruktif Masyarakat dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan, serta Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dicapai melalui : Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang daerah, Pendayagunaan sumber daya alam daerah, Pendayagunaan sumber daya alam laut, Peningkatan pendidikan dan kampanye penyadaran fungsi lingkungan hidup, Pengenalan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diwujudkan dengan :
 - (a). Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah;
 - (b). Mengembangkan kawasan-kawasan industrial terpadu yang lebih banyak lagi menampung tenaga kerja;
 - (c). Mewujudkan penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - (d). Mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang daerah diwujudkan dengan :
 - (a). Menekankan fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan daerah;
 - (b). Mengembangkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara sistematis komprehensif untuk mengurangi konflik kepentingan-baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok.
3. Pendayagunaan sumber daya alam daerah diwujudkan dengan :
 - (a). Merencanakan seluruh fungsi dan manfaat SDA secara seimbang dan memperhatikan daya dukung serta kemampuan pulih alaminya;
 - (b). Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam yang telah berada dalam kondisi kritis hingga pulih daya dukungnya;
 - (c). Memanfaatkan aspek-aspek tak berwujud SDA seperti jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - (d). Mengembalikan hasil pendapatan

yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan.

4. Pendayagunaan sumber daya alam laut diwujudkan dengan : (a). Menekankan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada antara daratan dan lautan; (b). Menekankan pemanfaatannya melalui pendekatan multisektor sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik dan keberlanjutan sumber daya tersebut tetap terjaga kelestariannya; (c). Menekankan pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan sehingga dapat menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi pada pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (d). Meningkatkan pemanfaatan fungsi wilayah laut secara serasi dengan memperhatikan keragaman daya dukung alam dan kelestarian ekosistem; (e). Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam laut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja.
5. Peningkatan pendidikan dan kampanye penyadaran fungsi lingkungan hidup diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan intensitas penanaman kecintaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama bagi generasi muda; (b). Meningkatkan jumlah generasi muda penggerak dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c). Meningkatkan sosialisasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
6. Pengenalan strategi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tentang rehabilitasi kerusakan lingkungan; (b). Mensosialisasikan strategi dan teknik pengendalian pencemaran lingkungan hidup; (c). Meningkatkan pengetahuan tentang fungsi kualitas lingkungan hidup.
7. Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b). Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup; (c). Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya demi pelestarian sumber kekayaan alam; (d). Menekankan bahwa pola hidup sehat dan seimbang memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian lingkungan hidup.

4. 2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai arah pembangunan sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan arah pembangunan jangka panjang.

Setiap arah pembangunan dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

4.2.1. TAHAP I (2006 – 2010)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan Tahap I diarahkan untuk menata kembali dan membangun Kabupaten Gresik di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Gresik yang agamis, cerdas, demokratis, dan sejahtera.

Gresik yang Agamis dicapai dengan Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa dan Berakhlakul Karimah, yang diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama.

Gresik yang Cerdas dicapai dengan Mewujudkan Sumber Daya Manusia

Masyarakat yang Berilmu dan Sehat melalui Pengelolaan Pendidikan dan Kesehatan serta Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Dinamis dan Bermoral.

Upaya Mewujudkan Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Berilmu dan Sehat melalui Pengelolaan Pendidikan dan Kesehatan diarahkan melalui : Peningkatan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Usia Dini, Non Formal, dan Khusus; Peningkatan Perluasan dan Pemerataan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9-12 Tahun; Peningkatan Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Tinggi; Peningkatan Pelayanan Pendidikan untuk masyarakat; Peningkatan Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pembangunan; Peningkatan Partisipasi Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat; Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat; Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Perbekalan Kesehatan; serta Pengembangan Manajemen Kesehatan.

Upaya Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional, Dinamis dan Bermoral diarahkan melalui : Peningkatan kualitas SDM aparatur; dan Pengembangan Etika Moral Aparatur

Gresik yang Demokratis dicapai dengan Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Hak dan Kewajiban, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), serta Mewujudkan Kondisi Daerah yang Aman, Tertib, dan Damai dengan Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM.

Upaya Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Hak dan Kewajiban diarahkan melalui : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Hak dan Kewajiban; serta Perkuatan Kelembagaan, Pangarusutamaan Jender dan Anak dalam Pembangunan.

Upaya Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) diarahkan melalui : Pengembangan Kapasitas Pemerintah dalam rangka Otonomi Daerah; serta Peningkatan Manajemen Pembangunan Daerah.

Upaya Mewujudkan Kondisi Daerah yang Aman, Tertib, dan Damai dengan

Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM diarahkan melalui : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Daerah; serta Peningkatan Penegakan dan Kepastian Hukum.

Gresik yang Sejahtera dicapai dengan Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Titik Berat ekonomi Kerakyatan, serta Mengembangkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Alam dan Buatan Secara Optimal dan Berkelanjutan.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat diarahkan melalui : Penanggulangan Kemiskinan; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin; Peningkatan kesempatan kerja; serta Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil berkualitas.

Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Titik Berat Ekonomi Kerakyatan diarahkan melalui : Pengembangan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata; Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; serta Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Upaya Mengembangkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Alam dan Buatan Secara Optimal dan Berkelanjutan diarahkan melalui : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sesuai Potensi; Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Buatan; serta Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.2.2. TAHAP II (2011 – 2015)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan Tahap I, pembangunan Tahap II ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Gresik di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian daerah.

Kondisi Agamis ditandai dengan semakin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, yang diarahkan melalui upaya meningkatkan pelayanan dan syiar keagamaan, meningkatkan kualitas moral, akhlak mulia, dan budi pekerti

luhur masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap munculnya aliran-aliran sesat dan ancaman terorisme yang berkedok agama; serta meningkatkan toleransi terhadap keberagaman.

Kondisi Dinamis ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, yang diarahkan melalui peningkatan pelayanan dan manajemen pendidikan dan kesehatan, peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimum serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah.

Kondisi Demokratis dicapai dengan mewujudkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin baik serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan daerah.

Kondisi Adil ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, meningkatnya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum daerah.

Kondisi Aman ditandai dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan daerah, yang diarahkan melalui peningkatan stabilitas keamanan daerah yang kondusif.

Kondisi Sejahtera ditandai dengan terus meningkatnya Kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antarkecamatan; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur

sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi; pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam daerah lainnya yang dimanfaatkan bagi tercapainya sasaran nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

4.2.3. TAHAP III (2016 – 2020)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan Tahap II, pembangunan Tahap III ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah berlandaskan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kehidupan beragama terus mengalami peningkatan pemahaman dan pengamalannya yang ditunjukkan dengan semakin mantapnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, yang ditandai dengan semakin besarnya akses dan tingginya kualitas pendidikan agama di dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah serta lembaga keagamaan, semakin baiknya fasilitasi pelayanan dan syiar keagamaan, semakin meningkatnya kualitas moral, akhlak mulia, dan budi pekerti luhur masyarakat, serta semakin tingginya toleransi terhadap keberagaman.

Kehidupan yang dinamis ditunjukkan dengan semakin merata dan bermutunya pelayanan, sistem dan iklim pendidikan, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, tingginya penguasaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Kehidupan demokrasi di Kabupaten Gresik makin mengakar dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan serta semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan di daerah dan kontribusi Kabupaten Gresik dalam berbagai kerja sama regional.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan di daerah berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur daerah makin mampu mendukung pembangunan daerah.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan regional dan nasional yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;

meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter daerah.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi daerah untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan listrik daerah yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Gresik.

Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik terus meningkat.

4.2.4. TAHAP IV (2021 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan Tahap III, pembangunan Tahap IV ditujukan bagi tercapainya sasaran masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis, dinamis, demokratis, adil, aman, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kehidupan beragama ditandai dengan telah terwujudnya karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta keharmonisan beragama masyarakat Kabupaten Gresik dengan didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kehidupan yang dinamis ditandai dengan mantapnya pertumbuhan dan perkembangan kemampuan ekonomi daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sumber daya alam maupun buatan yang maju berbasiskan IPTEK.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta, ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan terlindungi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang didukung oleh mantapnya stabilitas daerah; terwujudnya sistem hukum daerah yang mantap yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi daerah yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional dan nasional.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring

dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; serta bertahannya kondisi keseimbangan pertumbuhan penduduk.

Sejalan dengan tingkat kemajuan daerah, sumber daya manusia daerah diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis dan dikenal sebagai kota santri dan kota wali, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, terbuka, dinamis dan berorientasi iptek.

Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian daerah makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian daerah yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa.

Lembaga dan pranata ekonomi daerah telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian daerah yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita makin meningkat dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi daerah yang maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang handal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gresik; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian

yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, kekhasan sumber daya alam daerah terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Gresik untuk periode pembangunan 20 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk mengacu pada rumusan visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun RPJMD yang menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan menjadi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPJMD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025, Pemerintah Daerah dan Legislatif secara bersama-sama berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD dan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang lebih operasional.